

SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN REALISASI
ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021-2022**



**ANNESIANA KALA` MANGAPE
1910321085**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN REALISASI
ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021-2022**



Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Program Studi S1 Akuntansi

**ANNESIANA KALA` MANGAPE
1910321085**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS FAJAR
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

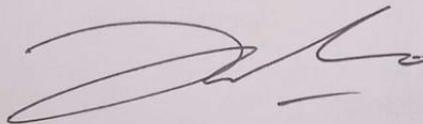
ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021-2022

disusun dan diajukan oleh

ANNESIANA KALA` MANGAPE
1910321085

Telah diperiksa, dan telah diuji
Makassar, 07 September 2023

Pembimbing



Juliana Sartika Diafar, S.E., M.Si
NIDN : 09010794043

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial
Universitas Fajar



PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN : 0925107801

SKRIPSI

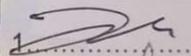
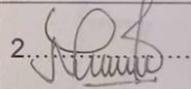
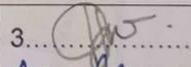
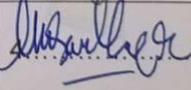
ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021-2022

disusun dan diajukan oleh

ANNESIANA KALA' MANGAPE
1910321085

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal, **07 September 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

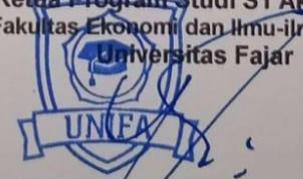
Menyetujui,
Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Juliana Sartika Djafar, S.E., M.Si NIDN: 0901079403	Ketua	
2.	Nurbayani, S.E., M.Si., CTA., ACPA NIDN: 0926098702	Anggota	
3.	Ghaliyah Nimassita Triseptya, S.E., M.Si NIDN: 0903099101	Anggota	
4.	Muhammad Cahyadi, SE, M.Si, AAAlJ, QIP, CDVP NIDN: 0911077502	Eksternal	

Dekan Fakultas Ekonomi
dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIVERSITAS FAJAR
DEKAN FAKULTAS
EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom
NIDN: 0925096902

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-ilmu Sosial
Universitas Fajar


UNIFA
PRODI AKUNTANSI
Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA
NIDN. 0925107801

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Annesiana Kala` Mangape

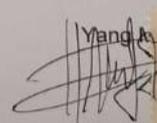
NIM : 1910321085

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal ayat 2 dan pasal 70).

Makassar. 07 September 2023

Yang A
 an,

Annesiana Kala` Mangape

PRAKATA

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah, sehingga peneliti dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Adapun maksud dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi (S. Ak.) pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar.

Peneliti banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama-tama, ucapan terima kasih peneliti berikan kepada Ayahanda Yohanis Kala` Mangape dan Ibunda Mariana, berkat dukungan dan tiada hentinya mendoakan, memotivasi, dan memberi semangat selama penelitian skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Juliana Sartika Djafar, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi masukan/ motivasi, dan memberi bantuan literature, dan diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan baik materil dan moril, maupun doa dari berbagai pihak. Berkat bantuannya segala kendala dapat peneliti atasi. Untuk itu dengan rasa hormat, peneliti ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
2. Ibu Dr. Yusmanizar, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

3. Ibu Yasmi, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA., ACPA selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Siprianus Palete, SE., M.Si., AK selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf di Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar, terkhusus untuk Sekretaris Program Studi S1 Akuntansi yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik.
6. Alentriana, Renatal, Riamayana dan Marvel adek- adek saya sebagai support system.
7. Untuk Sahabat perjuang dan tempat curhat saya Winiar
8. Stevanus Triputra selaku patner saya.
9. Teman-teman Akuntansi 2019, terima kasih atas saling memberikan semangat satu sama lain.
10. Dan untuk diri saya sendiri terima kasih sudah bertahan sampai ketahap ini.

Akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan saran-saran sehingga segala amal baktinya dapat diterima di sisi Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan laporan ini.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 07 September 2023

Penulis

Annesiana Kala` Mangape

ABSTRAK

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021–2022

Annesiana Kala` Mangape

Juliana Sartika Djafar

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyusunan anggaran berbasis kinerja dan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja apakah sudah berjalan secara efektif dan efisien. Waktu penelitian dilakukan mulai bulan juni sampai bulan juli 2023. Metode analisis yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menguraikan, menggambarkan, membandingkan dan menerangkan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran berbasis kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang pedoman penyusunan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah dan realisasi anggaran yang sudah berjalan efektif dan efisien dengan tingkat tercapainya $\geq 80\%$ dengan pengukuran analisis varians.

Kata Kunci : Anggaran, Anggaran Berbasis Kinerja, Realisasi Anggaran

ABSTRAK

ANALISIS PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2021–2022

Annesiana Kala` Mangape

Juliana Sartika Djafar

The aim of this research is to determine whether performance-based budget preparation and budget realization at the Regional Financial and Asset Management Agency of Tana Toraja Regency have been running effectively and efficiently. The research was carried out from June to July 2023. The analytical method used was the qualitative descriptive method, namely research that describes, describes, compares and explains the data.

The results of the research show that the preparation of a performance-based budget for the Regional Financial and Asset Management Agency of Tana Toraja Regency is in accordance with Minister of Home Affairs Regulation Number 21 of 2011, concerning guidelines for preparing the APBD and Regional Financial Management and the realization of the budget which has been running effectively and efficiently with an achievement level of $\geq 80\%$ by measurement analysis of variance.

Keywords: Budget, Performance Based Budget, Budget Realization

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBER PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBER PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Anggaran	10
2.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik	19
2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja	22
2.1.4 Realisasi Anggaran.....	25
2.1.5 Analisis Varians	27
2.2 Tinjauan Empiris.....	29
2.3 Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1 Rancangan Penelitian	35
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	35
3.3 Jenis dan Sumber Data	36
3.4 Teknik Pengumpulan Data	36
3.5 Teknik Analisis Data.....	37

3.6 Pengecekan Validasi Temuan	38
3.7 Tahapan Penelitian	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Serajah BPKAD Kabupaten Tana Toraja	42
4.2 Hasil Penelitian.....	47
4.3 Pembahasan	52
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	29
Tabel 4. 1 Perhitungan Penilaian Presentase Tahun 2021-2022.....	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Tana Toraja.....	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di negara kita ini instansi yang terdapat dibagian pemerintahan baik daerah maupun pusat tidak terlepas dari sebuah penganggaran, baik penganggaran pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematis. Penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Muhsun (2006) Anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran memegang peran yang sangat penting karena anggaran dapat mengarah pada sumber daya yang dimiliki organisasi untuk mencapai tujuan yang di tetapkan.

Menurut Mardias (2009) Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Instansi pemerintah sekarang ini di hadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dimana pihak pemerintahlah yang menjalankan roda perekonomian, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dan eksternal yaitu tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejaterah sebagai suatu implikasi dari program pemerintah dalam mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Sehingga anggaran pada instansi pemerintahan selain berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian juga berfungsi sebagai *instrument* akuntabilitas publik atas dasar pengelolaan dana publik.

Dengan direvisi UU No.25 Tahun 1999 ke UU No.33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan perundangan-undangan yang berhubungan dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam hal mengelola penerimaan dan pengeluaran sesuai kebutuhan masing-masing, daerah setiap daerah diberikan kewajiban dan wewenang dalam mengatur dan menyusun anggaran belanja daerah.

Mardiasmo (2022) menyatakan bahwa Anggaran adalah rencana kerja yang dituangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka Panjang, dimana anggaran jangka pendek dibuat dengan jangka waktu paling lama setahun sedangkan anggaran jangka panjang dibuat dengan jangka waktu lebih dari setahun. Anggaran adalah dokumen yang berisi estimasi kinerja, baik berupa penerimaan dan pengeluaran, yang disajikan dalam ukuran moneter yang akan dicapai pada periode waktu tertentu dan menyertakan data masa lalu sebagai bentuk pengendalian dan penilaian kinerja. Anggaran juga merupakan laporan resmi yang berisi suatu perencanaan dan pengendalian keuangan yang membiayai pelaksanaan aktivitas sehingga dapat di implementasikan secara sistematis dan formal untuk mencapai tujuan dan dilakukan melalui koordinasi dan kontrol tanggung jawab manajemen.

Dalam penerapan aturan Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD). Adanya RKA-SKPD ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana penggunaan sistem anggaran berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran daerah sebagai dasar

menentukan besar pendapatan serta pengeluaran, membantu dalam pengambilan keputusan, dan serta perencanaan pembangunan.

Anggaran yang telah dilaksanakan harus di pertanggung jawabkan atas alokasi dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan sebelumnya. Penerapan penyusunan anggaran berbasis kinerja, merupakan bagian dalam proses penyempurnaan manajemen keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik serta efektifitas dari pelaksanaan kebijakan dan program.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja yang berfokus pada interaksi strategi pemerintah daerah, yang telah memberikan landasan teori dan metode analisis untuk kegiatan pembelanjaan daerah. Belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) banyak mengundang perhatian dimana memiliki kepentingan untuk memberikan informasi apakah anggaran digunakan dengan semestinya, efisien, efektif, dan berorientansi.

Pada kebijakan Menteri Dalam Negeri RI No. 77 Tahun 2020, menerangkan mengenai panduan cara tata kelola keuangan daerah. Ditetapkan dalam pasal 1 yang menyatakan bahwasanya tata Kelola keuangan daerah tersebut meliputi secara menyeluruh aktivitas yang mencakup pembuatan rencana, anggaran, tata kelola, tata usaha, pembuatan laporan, adanya tanggung jawab, serta pemeliharaan keuangan yang didalamnya APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu perancangan anggaran pertahun yang di tetapkan dalam PERDA (Peraturan Daerah) yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dalam peraturan daerah.

Dalam pemerintahan, salah satu yang perlu dilakukan adalah pengelolaan keuangan, karena dapat digunakan untuk perencanaan dan penganggaran, untuk melaksanakan berbagai kegiatan kerja yang dapat direalisasikan sesuai

dengan keinginan dan harapan namun tetap berdasarkan anggaran yang telah disetujui. Dalam setiap pelaksanaan rencana kerja pemerintah, dipastikan memiliki anggaran yang telah disediakan. Serta dalam penyusunan anggaran yang relevan dan diharuskan untuk fokus pada setiap program kerja agar implementasi anggaran dapat berjalan sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disetujui.

Menurut Mardismo (2020), realisasi adalah suatu proses untuk menjadikan suatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Realisasi juga merupakan Tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan dan diharapkan, dibidang akuntansi realisasi bermakna uang yang konvensi dari aktiva, barang dan jasa, menjadi *cash* atau piutang yang melalui tahap penjualan. Setiap orang ingin mewujudkan semua keinginanya maka dari itu lakukan perencanaan terlebih dahulu. Oleh karena itu realisasi dari sebuah rencana sangatlah penting dalam mewujudkan keinginan setiap orang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah di rencanakan.

Menurut Mandar (2011), Realisasi Anggaran adalah seluruh kegiatan yang juga meliputi kegiatan analisis serta evaluasi budget. Realisasi Anggaran adalah laporan yang menggambarkan pertandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sangat berperan penting terhadap pemerintah daerah, maka dari itu pemerintah diharuskan melaksanakan perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Dan Daerah dengan sempurna. Tujuan realisasi anggaran ini adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar agar di periode-periode berikutnya bisa lebih baik lagi. Pemerintah daerah bebas

berinisiatif untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, dengan syarat tidak melanggar perundang-undangan yang berlaku.

Keterkaitan antara penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan realisasi anggaran memberikan gambaran bagaimana sebuah instansi dapat dikatakan efektif atau tidak, dalam pengambilan keputusan yang berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan selama setahun. Dengan alat ukur berupa analisis yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisis anggaran tersebut. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang. Untuk mengetahui secara langsung besarnya varians anggaran belanja yang dapat direalisasikan dinyatakan dalam bentuk nominal atau presentase.

Untuk mengetahui seberapa besar penyusunan anggaran berbasis kinerja dan realisasi anggaran dapat terwujud dalam suatu instansi dapat kita lihat seberapa besar pemenuhan pada belanja kegiatan yang digunakan. Dengan melakukan pengukuran yang dapat menggunakan Analisis Varians Anggaran Belanja. Cara untuk menganalisis varians anggaran belanja adalah dengan menilai belanja langsung dan belanja tidak langsung. Analisis varians anggaran belanja adalah analisis terhadap perbedaan atau selisih anggaran belanja dengan realisasi anggaran. Analisis varians anggaran belanja dilakukan untuk mengetahui keseimbangan antara belanja yang menggambarkan bagaimana penyusunan anggaran yang dapat terealisasikan secara optimal.

Seperti pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Seli Fatmahwati (2021), tentang Analisis Kinerja Belanja Daerah Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada BPPKAD Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggaran pada tahun anggaran 2020 anggaran belanja BPPKAD Kota Surakarta dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mengalami penurunan, hal ini berbeda dengan tahun 2018 dan 2019 dimana pada tahun 2018 anggaran belanja

sebesar Rp. 2.091.964.585.155 yang terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp 177.146.190.759,17 atau sebesar 8,47% dan pada tahun 2019 sebesar Rp. 2.197.454.843.803 yang terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja yaitu sebesar Rp 185.046.730.940,17 atau sebesar 8,42%, sedangkan tahun 2020 sebesar Rp. 1.886.698.244.826 memiliki selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja yaitu sebesar Rp 247.835.725.505,00 atau sebesar 13,14%.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah instansi yang melaksanakan sebagian kewewengan atau urusan pemerintah daerah berdasarkan asa otonomi dan tugas perbantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Kabupaten Tana Toraja adalah salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan yang memiliki beberapa Desa, sehingga potensi untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup besar. Dikarenakan daerah yang ada diwilayah kabupaten Tana Toraja cukup besar, penyusunan anggaran sangat penting dilakukan untuk meminimalisir ketidak efektifan dan tidak berorientasi pada kinerja yang justru mengagalkan program kerja yang telah di susun sebelumnya. Semua program yang di susun membutuhkan biaya untuk menunjangnya, untuk itu dibutuhkan pengalokasian biaya yang benar agar menghasilkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Hal ini akan menjadi pembanding antara anggaran dan realisasi dalam satu periode laporan.

Berdasarkan kebijakan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, menjelaskan bahwasanya realisasi anggaran bertujuan dalam penerapan berbagai dasar cara laporan disajikan yang berguna terhadap keperluan pemerintah untuk mencukupi sasaran akuntabilitas yang telah diberlakukan dari kebijakan undang-undang, dan berguna dalam memberi informasi realisasi serta mengumumkan subtansi rencana keuangan. Melakukan analisis realisasi serta anggaran sebuah

pemerintah pada akhir tahun anggaran sangat penting dilakukan untuk bisa memaksimalkan anggaran sudah sesuai dengan realisasinya, pada wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan Bapak Micha Lembang SE.,MM pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja, tidak sejalannya anggaran dan realisasi ini terjadi dikarenakan adanya salah penempatan nama akun pada penyusunan anggaran seperti anggaran yang seharusnya masuk di akun belanja hibah tetapi malah dimasukkan ke belanja modal, sehingga memungkinkan terdapat kekurangan penerapan fungsi pengelolaan serta pengendalian yang dilakukan pemerintah di tiap-tiap pelaksanaan program kerja. Ketidak sesuai anggaran dan realisasi yang didapatkan tersebut dapat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dilihat dari penelitian sebelumnya pada kota Surakarta dan wawancara awal yang dilakukan peneliti bahwa terjadi penurunan mengakibatkan selisih penyusunan anggaran belanja dan realisasi anggaran. Terkait data tersebut peneliti ingin melakukan penelitian mengenai penyusunan anggaran berbasis kinerja dan realisasinya di instansi Badan Penglolaan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja, untuk melihat membandingkan apakah anggaran yang dibuat telah terealisasi sesuai dengan program yang telah disusun dan disetujui.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: “Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Bagaimana proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja?
- 2) Apakah realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022 sudah berjalan dengan efektif dan efisien?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di kemukakan di atas maka, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- 2) Untuk menganalisis tentang realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022 sudah berjalan dengan efektif dan efisien.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dapat dibagi atas dua yaitu:

- 1) Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan menambah wawasan tentang bagaimana Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022, serta dapat menjadi bahan acuan peneliti lainnya.

- 2) Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian ini bagi peneliti, bagi Universitas Fajar Makassar dan bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.

b. Bagi Universitas Fajar Makassar

Diharapkan penelitian ini memberikan informasi yang akurat tentang seberapa besar Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Serta peneliti ini juga dapat menjadi bahan acuan dalam mengembangkan laporan selanjutnya bagi mahasiswa Angkatan selanjutnya.

c. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja

Dapat dijadikan bahan masukan dan perbandingan bagi pemerintah Kabupaten Tana Toraja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melakukan analisis penyusunan anggaran berbasis kinerja dan realisasi anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Adapun landasan teori yang digunakan yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Anggaran

Anggaran berasal dari kata *budget* (inggris), yang sebelumnya dari kata *bougette* (prancis) yang artinya “sebuah tas kecil”. Anggaran dalam artian luas meliputi jangka waktu anggaran direncanakan, dilakukan, dan di pertanggungjawabkan. Anggaran merupakan rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan dalam satuan instansi. Dalam perkembangannya, mekanisme birokrasi menjadi mekanisme yang sangat penting karena besarnya makin meningkat. Perkembangan penganggaran terjadi selaras dengan upaya pengalokasian sumber daya yang semakin lama semakin membaik dalam mengakomodasi berbagai penganggaran (Bastian, 2010).

Pengelolaan anggaran telah menjadi perhatian bagi pengambil keputusan pemerintah, baik ditingkat pusat ataupun daerah. Sejauh ini bernilai perundang-undangan dan produk hukum telah dikeluarkan dan di berlakukan dalam upaya untuk menciptakan sistem pengelolaan anggaran yang mampu memenuhi berbagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.

Menurut Halim (2014) Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan atau instansi untuk jangka waktu (periode tertentu dimasa yang akan datang). Dalam bentuk yang paling sederhana,

anggaran merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas.

Dari beberapa defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah alat bantu yang sangat penting dalam sebuah rencana dari suatu kegiatan yang akan dilakukan oleh instansi atau perusahaan, dimana suatu rencana kegiatan diwujudkan dalam bentuk finansial yang meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu serta dikembangkan untuk melayani berbagai tujuan termasuk pengendalian keuangan, perencanaan manajemen, prioritas dari berbagai dana dan pertanggungjawaban publik. Oleh sebab itu anggaran merupakan pedoman pelaksanaan kerja dan berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai instansi atau perusahaan.

Anggaran memiliki fungsi sebagai alat untuk mengukur suatu perencanaan. Menurut Herlianto (2015), penerapan anggaran pada suatu perusahaan merupakan alat untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan koordinas, pengawasan dan juga sebagai pedoman dalam menjalankan perusahaan untuk tujuan yang telah ditetapkan.

Bagi oraganisasi publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2002), mendefenisikan bahwa anggaran publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- 1) Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran publik dibuat untuk merencanakan Tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2) Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai *instrument* pengendalian digunakan untuk menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar, dan terlalu rendah. Salah sasaran atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya.

3) Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah, digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi.

4) Anggaran sebagai alat politik

Pada publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksklusif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.

5) Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Melalui dokumen anggaran yang komprehensif, sebagai bagian atau unit kerja atau departemen yang merupakan sub-organisasi dapat mengetahui apa yang harus dilakukan dari apa yang dilakukan oleh bagian atau unit kerja lainnya.

6) Anggaran sebagai alat penilaian kerja

Kinerja eksklusif dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan beberapa hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

a. Karakteristik Anggaran

Anggaran harus disusun dan dihitung dengan cermat agar operasional perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Untuk mewujudkan hal tersebut anggaran harus memiliki karakteristik. Robert & Vijaya (2009), karakteristik tersebut terdiri:

- 1) Anggaran yang umumnya mencakup jangka waktu tertentu, yaitu satu atau beberapa tahun.
- 2) Anggaran yang berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.
- 3) Usulan anggaran yang telah disetujui oleh pihak berwenang yang lebih tinggi dari penyusun anggaran.
- 4) Anggaran yang telah disusun hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

b. Siklus Anggaran

Menurut Mardiasmo (2011), menjelaskan siklus anggaran melalui tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahapan persiapan penganggaran
Tahapan persiapan penganggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar pendapatan yang tersedia. Di dasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, hendaknya dilakukan penaksiran lebih akurat.
- 2) Tahapan rekapitulasi
Dalam tahap ini pemimpin eksklusif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3) Tahapan pelaksanaan anggaran

Dalam tahap ini yang paling penting adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

4) Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi yang lebih baik.

c. Penyusunan Anggaran

Anggaran adalah rencana kerja yang disusun secara tertulis, kuantitatif, formal dan sistematis mengenai perkiraan kegiatan, penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satu unit moneter (uang) dan berjangka waktu tertentu dalam menjalankan operasional sehari-hari.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau biasa disingkat APBD adalah rencana kerja pemerintah daerah, yang menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan dan belanja/pengeluaran pemerintah daerah, dalam waktu satu tahun yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk membiayai kegiatan, proyek, dan operasional kerja pemerintah daerah serta digunakan sebagai alat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam rencana pembangunan.

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang di tetapkan. Menurut Mustopadidjaya, AR (1999) mengemukakan, bahwa kegiatan Penyusunan Anggaram Pemerintah Daerah

(APBD) meliputi perencanaan pendapatan dan pengeluaran. Pada sisi pendapatan dilakukan estimasi penerimaan daerah yang mungkin dicapai pada tahun yang akan datang, begitu juga dengan pemikiran pengeluaran rutin, termasuk belanja pegawai dan kegiatan lainnya.

Penyusunan APBD oleh pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 17 tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang pedoman penyusunan APBD dan Pengelolaan Keuangan, contoh untuk tahun anggaran 2022 berpedoman pada Permendagri Nomor 27 Tahun 2021. Dalam penyusunan harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan efisien. Dalam Menyusun APBD, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya, antar pendapatan dan belanja harus berimbang.

Dapat disimpulkan bahwa, APBD sebagai sebuah rencana keuangan daerah yang diadakan dalam kedudukan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang ditarget dalam kurun waktu satu tahun yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD yang selanjutnya disepakati bersama dan ditetapkan dalam peraturan perundangan yang disebut peraturan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi aspek yang sangat penting dalam menjalankan tata kelola pemerintahan daerah. Pengelolaan keuangan daerah bahkan menjadi faktor penentu jalannya roda pemerintahan daerah. Olehnya itu, pengelolaan keuangan daerah dikelola secara baik dan bersih, untuk mewujudkannya, maka pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Untuk mencapai sasaran dari APBD, maka substansi pokok APBD harus terdiri dari tiga komponen utama yaitu terkait dengan Pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Belanja daerah sendiri diklasifikasikan dalam urusan pemerintah daerah yang (wajib dan pilihan), organisasi, program, kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek belanja. Klasifikasi belanja daerah pada umumnya kerap didengar dengan pemberian belanja langsung dan tidak langsung. Pendapatan di kelompokkan dalam pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain-lain yang sah. Demikian pula pembiayaan disini meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ketiga komponen ini sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya jalannya pemerintahan, kualitas ekonomi dan tentu tingkat kesejahteraan suatu daerah.

Dalam penyusunan APBD hendaknya mengacu pada norma dan prinsip anggaran yanik sebagai berikut:

1) Transparansi dan Akuntabilitas

Pemerintah daerah harus transparan terkait informasi mengenai sasaran, hasil dan manfaat kepada masyarakat atau setidaknya kepada DPRD sebagai Lembaga perwakilan mengenai APBD dan setiap dana yang diperoleh dan digunakan harus dipertanggungjawabkan.

2) Disiplin Anggaran

Penyusunan APBD seharusnya sejalan dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, selain itu perlunya memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas biaya pembiayaan penyelenggaraan pemerintah, pelayanan masyarakat dan pembangunan serta harus berpegang pada asas efisiensi, tepat waktu, tepat guna dan paling penting dapat dipertanggungjawabkan.

3) Keadilan Anggaran

Alokasi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan.

4) Efisiensi dan Efektifitas

Anggaran yang sudah tersedia harus digunakan sebaik-baiknya agar dapat menghasilkan iuran berupa pada pelayanan dan kesejahteraan yang merupakan bagian dari kepentingan masyarakat, dalam perencanaan anggaran harus ditetapkan secara jelas mengenai pencapaian tujuan, sasaran hasil serta manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang diprogramkan.

5) Format Anggaran

APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit untuk mengetahui adanya selisih antara pendapatan dan belanja yang akan mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

APBD menjadi *instrument* untuk menggerakkan penggunaan keuangan daerah guna pencapaian dari tujuan pemerintah daerah yakni terwujud kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah, dengan demikian APBD merupakan *instrument* untuk menciptakan kesejahteraan umum, sehingga karena itu sudah seharusnya bahwa APBD itu dikelola oleh masyarakat setempat, merekalah yang paling cocok untuk menyusun anggaran daerah hanya saja tentu mulai perantara wakil melalui pemberian sebagai kedaulatan rakyat yang dalam hal ini kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam proses penyusunan anggaran melibatkan serangkaian Langkah yang harus diikuti untuk merumuskan anggaran pemerintah daerah berikut

adalah Langkah-langkah umum yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran daerah:

- 1) Penetapan kebijakan dan prioritas: kebijakan ini mencakup tujuan pembangunan daerah, program strategis, dan kebutuhan mendesak yang perlu di prioritaskan.
- 2) Perencanaan program dan kegiatan: program dan kegiatan dilaksanakan oleh pemerintah daerah direncanakan secara terperinci. Hal melibatkan identifikasi program yang mendukung kebijakan dan prioritas yang telah ditetapkan, serta penentuan target kinerja alokasi sumber daya yang diperlukan.
- 3) Estimasi pendapatan: pemerintah daerah melakukan estimasi pendapatan yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pajak daerah, transfer keuangan dan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lainnya. Estimasi ini berfungsi sebagai dasar untuk menentukan besarnya belanja yang dapat dianggarkan.
- 4) Penentuan Belanja: Berdasarkan program dan kegiatan yang direncanakan serta estimasi pendapatan, pemerintah daerah menentukan alokasi belanja untuk setiap sektor dan kegiatan. Pada tahap ini, prioritas belanja ditetapkan dan dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan urgensi.
- 5) Evaluasi dan pembahasan: anggaran yang telah disusun dievaluasi dan dibahas dalam forum yang relevan, seperti Badan Anggaran atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Proses ini melibatkan peninjauan ulang terhadap anggaran, perbaikan atau penyelesaian yang diperlukan, serta diskusi untuk mencapai kesepakatan antara legislatif.

- 6) Persetujuan anggaran: setelah dilakukan evaluasi dan pembahasan, anggaran daerah diajukan untuk mendapatkan persetujuan untuk menandai akhir dari proses penyusunan anggaran daerah.
- 7) Pelaksanaan dan monitoring: setelah disetujui, pemerintah daerah melaksanakan kegiatan dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan. Selama pelaksanaan, juga dilakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan penggunaan dana yang efektif dan akuntabel.

2.1.2 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang beragam, hal tersebut merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (ekonomi, politik, hukum dan sosial) memiliki cara pandang yang berbeda-beda. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah, karena daerah kabupaten dan kota berhubungan langsung dengan masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa terlepas dari anggapan pemerintah daerah, penerapan akuntansi, dan sistem pelaporannya. Dalam penyusunan anggaran diperlukan komunikasi antara atasan dan bawahan untuk saling memberikan informasi terutama yang bersifat informasi lokal karena bawahan lebih mengetahui kondisi langsung pada bagiannya. Anggaran merupakan alat akuntansi yang dapat membantu pemimpin perusahaan atau pemerintah dalam merencanakan, mengendalikan atau menjalankan operasi instansi pemerintahan atau perusahaan. Anggaran digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan terkendali.

Ada beberapa pengertian anggaran menurut para ahli, setiap definisi memberikan pengertian dan gambaran tersendiri mengenai apa yang dimaksud dengan anggaran dilihat dari sudut pandang mereka tetapi memiliki maksud yang sama. Seperti yang dijabarkan oleh Mardiasmo (2011), dari sudut pandang ekonomi, anggaran sektor publik dapat dipahami sebagai entitas yang didalamnya berhubungan dengan usaha yang menghasilkan barang dan pelayanan publik merupakan suatu wadah pemerintah untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan publik dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat. Dalam menjalankan segala aktivitas sektor publik Menyusun seluruh kegiatan dan program kerja dalam sebuah anggaran.

Anggaran sektor publik seperti yang dikemukakan oleh Bastian (2013) adalah suatu rencana yang didalamnya bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Menurut Nordiawan dan Hertianti (2012), mendefinisikan anggaran sektor publik sebagai berikut:

Anggaran sektor publik dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyatakan hal-hal berikut:

- 1) Rencana-rencana organisasi sektor publik untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.
- 2) Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan rencana tersebut.
- 3) Perkiraan sumber-sumber yang akan menghasilkan pemasukan serta besarnya pemasukan tersebut.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan rencana finansial yang menyatakan rincian seluruh aspek kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sektor publik, yang direpresentasikan dalam bentuk

reca pendapatan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter dan didanai dengan uang publik.

Bagi organisasi sektor publik pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas pengelolaan dana yang dibebankan kepadanya. Mardiasmo (2009) menguraikan fungsi utama anggaran sektor publik sebagai berikut:

1) Alat perencanaan (*Planning Tool*)

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perusahaan jangka Panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

2) Alat pengendalian (*Control Tool*)

Anggaran sebagai instrument pengendalian lingkungan untuk menghindari adanya *overspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.

3) Alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*)

Melalui anggaran dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Alat politik (*Political Tool*)

Dalam organisasi sector publik, melalui anggaran dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.

- 5) Alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication Tool*)
Setiap unit kerja pemerintah terkait dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya pencapaian tujuan organisasi secara tidak konsisten.
- 6) Alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*)
Dalam hal ini, kinerja pemegang anggaran akan dinilai berdasarkan pencapaian target dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja manajer publik dinilai berdasarkan hasil yang dicapai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.
- 7) Alat motivasi (*Motivation Tool*)
Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi pemimpin dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 8) Alat menciptakan ruang publik (*Public Sphere*)
Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

2.1.3 Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sebuah sistem penganggaran yang berfokus pada hasil yang akan dicapai. Bastian (2006) menyebutkan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang berorientasi pada *output* organisasi yang berkaitan erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategis organisasi. Selanjutnya menurut Mardiasmo (2002) anggaran merupakan penyusunan dan pengelolaan

anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kinerja adalah keluaran/hasil dari program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas atau kualitas yang terukur. Kinerja tersebut mencerminkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.

Anggaran berbasis kinerja disusun berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai dan setiap dana yang dikeluarkan sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan pendekatan kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui *internal cost awareness*, audit keuangan berdasarkan *cost minded* dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan.

Menurut Direktorat Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (2005) tujuan dari anggaran kinerja adalah untuk:

1. Mengaitkan antara pendanaan dan kinerja yang akan di capai.
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.
3. Meningkatkan akuntabilitas dan fleksibilitas dalam hal pelaksanaan pengelolaan anggaran.

a. Unsur - Unsur Pokok Anggaran Berbasis Kinerja

Menurut Badan Pendidikan dan Pekatihan Keuangan (2008), unsur-unsur dari penganggaran yaitu:

1) Pengukuran kinerja

Pengukuran kinerja merupakan proses yang objektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan juga menggunakan informasi untuk menentukan keefektifan dan keefisienan pelayanan yang

dilaksanakan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

2) Penghargaan dan hukuman (*Reward and Punishment*)

Pelaksanaan sistem anggaran berbasis kinerja sulit dicapai dengan maksimal tanpa ditunjang dengan faktor-faktor yang dapat menunjang pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

3) Kontrak kinerja

Apabila sistem anggaran berbasis kinerja telah berkembang dengan baik, maka kontrak kinerja dapat diterapkan. Atas nama pemerintah, Departemen Keuangan dapat melaksanakan kontrak atas pencapaian suatu kinerja dengan kementerian/Lembaga lainnya dan juga antara Menteri dengan unit organisasi yang ada dibawahnya.

4) Kontrol eksternal dan internal

penggunaan *control* terhadap anggaran harus dilakukan oleh Lembaga yang berada diluar penggunaan anggaran. Penggunaan anggaran harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu sebelum mereka menggunakannya.

5) Pertanggungjawaban manajemen

Jika sistem penganggaran menakan pada kontrol *input*, maka sistem anggaran berbasisi kinerja ditekankan pada *output*. Dalam sistem ini penggunaan anggaran mendapat wewenang penuh dalam merencanakan dan mengelola anggarannya.

Akuntabilitas pemerintah pusat dan daerah dapat diukur dengan pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja juga memiliki peran yang signifikan dengan pengendalian guna menjamin bahwa organisasi dapat dikelola sesuai dengan keinginan semua *stakeholders*. Lin dalam Tuasikal (2006), menegaskan pengukuran dan penilaian kinerja

pemerintahan merupakan hal yang sangat vital karena peningkatan kualitas dan *comparability* informasi keuangan pemerintah menjadi tugas yang penting.

Penetapan ukuran atau indikator keberhasilan sasaran dari belanja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD) merupakan hal yang sangat penting untuk pencapaian kinerja. Oleh karena itu aktivitas dan pengeluaran biaya dilaksanakan pada tiap satuan kerja perangkat daerah, maka kinerja yang dimaksud akan menggambarkan tingkat pencapaian dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program.

2.1.4 Realisasi Anggaran

Realisasi diartikan sebagai proses pelaksanaan sesuatu hingga menjadi kenyataan. Di dalam istilah yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Menurut Prasetya (2010) realisasi anggaran adalah laporan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja dengan realisasinya yang menunjukkan ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan perundang-undangan. Menurut Gansson (2012) anggaran merupakan rencana terperinci yang menunjukkan bagaimana sumber daya yang akan diperoleh dan digunakan selama jangka waktu tertentu.

Laporan realisasi anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola pemerintah pusat/daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran atau realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan realisasi adalah laporan yang berisi tentang informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja dan biaya.

Unsur yang mencakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas Pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara umum Negara/Bendahara umum Daerah atau entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dari dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara umum Negara/Bendahara umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*Financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Laporan realisasi anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Selain laporan realisasi anggaran ini juga disajikan 2 kali dalam setahun, yaitu laporan semester dan laporan tahunan. Dalam situasi tertentu tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan realisasi anggaran tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau pendek dari satu tahun.

a. Manfaat Pelaporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi

tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran.

Disamping hal diatas, laporan realisasi anggaran (LRA) juga menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumberdaya ekonomi yang akan diterima untuk memadai kegiatan pemerintah pusat/daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan realisasi anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi.

2.1.5 Analisis Varians

Menurut Mahmudi (2016) menyatakan bahwa hal yang paling penting untuk menganalisis belanja daerah dimana untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah melakukan anggaran belanja daerah secara ekonomis, efisiensi dan efektif serta sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran. Menurut Saron (2017) menyatakan semakin besar realisasi anggaran belanja maka semakin tinggi pula presentase tingkat efektif dan efisien pelaksanaan anggaran. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan yang disajikan.

Analisis varians atau selisih adalah perbedaan antara suatu rencana atau target dan suatu hasil. Varians memberikan indikasi atau suatu peringatan bahwa operasi tidak sejalan sebagaimana yang direncanakan, analisis selisih ini merupakan suatu metode perbandingan yang digunakan untuk mengetahui selisih antara anggaran dengan realisasi yang dicapai oleh instansi dalam kegiatan operasional. Dalam melakukan analisis varians akan menghasilkan selisih antara anggaran dengan realisasi. Penyimpangan tersebut ada yang

bersifat *favorable* dan *unfavorable* untuk mengetahui hak tersebut dapat dilihat dari hal yang signifikan antara anggaran belanja dan realisasinya.

Secara umum varians dapat digolongkan kedalam varians sistematis dan varians valet. Varians sistematis adalah varians pengukuran karena adanya pengaruh yang menyebabkan skor atau nilai data lebih condong kesatu arah tertentu dibandingkan kearah lainnya.

Ada metode analisis varians yaitu analisis varians belanja, analisis presentase dan skala penilaian presentase realisasi belanja:

1) Analisis varians belanja

Analisis varians belanja merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja, jika terdapat selisih lebih (realisasi melebihi jumlah yang dianggarkan) maka dikatakan memiliki kinerja keuangan yang tidak baik, sedangkan jika terdapat selisih kurang (realisasi belanja kurang dari jumlah anggaran) maka kinerja keuangan daerah dapat dinilai baik (Mahmudi 2016).

Menurut Mahmudin (2016) rumus untuk menghitung varians belanja

$$\text{Analisis Varians Belanja} = \text{Realisasi Anggaran} - \text{Analisis Belanja}$$

2) Analisis presentase varians belanja

Analisis presentase varians belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dengan rumus dari Mahmudi (2010)

$$\text{Presentase Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

3) Skala penilaian presentase realisasi belanja

Menurut peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga Nomor 249/PMK.02/2011 bahwa terdapat skala penilaian dalam presentase realisasi anggaran sebagai dimaksud pada ayat (2) di kelompokkan dalam 5 (lima) kategori sebagai berikut:

No	Nilai Angka	Inpresentasi
1	90% - 100%	Sangat Baik
2	80% - 90%	Baik
3	60% - 80%	Cukup atau Normal
4	50% - 60%	Kurang
5	< 50%	Sangat Kurang

2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dan contoh dalam pembuatan penelitian ini sehingga memberikan gambaran kepada penulis untuk menyusun penelitian ini yaitu:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti Dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Jukhairia Ritonga, Nurlia (2022)	Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kiberja dan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Pemerintah Kota Medan	Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan tahun 2020 dan 2021 memiliki tingkat penyerapan yang sudah baik sehingga selisih yang ada tidak

				<p>melebihi dari yang dianggarkan, meskipun melebihi semuanya harus memalui instrument koreksi rencana keuangan. Selisih yang terjadi tersebut disebabkan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daeha Kota Medan melakukan penghematan anggaran pada setiap kegiatan. Sehingga diperlukan perencanaan biaya atau anggaran untuk pengendalian anggaran dan juga pengawasan terhadap kinerja anggaran berbasis kinerja agar terjadi realisasi yang tidak sesuai dengan yang dianggarkan pada periode awal.</p>
2	Prisilia Meilita Rawung (2021)	Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Minera Daerah Provinsi Sulawesi Utara	Kualitatif	<p>Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara, telah melakukan penyusunan anggaran untuk setiap program, tetapi masih ada program kerja yang tidak dijalankan di karenakan anggaran yang seharusnya ada di belanja hiba malah masuk di anggaran belanja modal. Meskipun demikian program kerja yang di anggarkan telah terlaksana dengan baik dan tidak melebihi biaya yang di anggarkan.</p>

3	Ifrah Dwiyant, Candra Romanda (2021) Juli	Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuasin	Kualitatif	Dari hasil meneilitan menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bayumasin laporan keuangan pemerintah sudah dikatan berkualitas, hal ini dilihat dari laporan realisasi anggaran dari tahun 2016-2019 yang telah memenuhi karakteristik laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Ast Daerah Kabupaten Bayuasin juga telah melakukan penerapan Anggaran Berbasis kinerja dengan baik yang dapat dilihat dari realisasi kinerja dengan target kerja dan pendanaan pada setiap program yang telah di rencanakan.
4	Fanda Jessica Mentang, Harijanto Sabijono (2020)	Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Mnado	Kualitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan dari tahun 2016 sampai 2018 pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pngembangan Daerah Kota Manado tidak melebihi dari yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daaerah Kota Manado melakukan penghematan anggaran dari setiap kegiatan. Meskipun dilihat dari sisi kinerja keuangan kurang dari 100%, tetapi jika

				dengan hasil tersebut iurannya sudah tercapai maka itu merupakan hal yang baik, sebaliknya dari sisi keuangan sudah mencapai 100% tetapi iurannya tidak tercapai, itu merupakan.
5	Fadila Nurhaliza (2022)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara	Kuantitatif	Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, memiliki kinerja keuangan yang menurun, hal ini disebabkan anggaran yang sudah direncanakan diahlikan ke belanja barang dan jasa dan diahlikan ke hutang pemerintah, sehingga kantor DPRD PROVSU belum memanfaatkan anggarannya dengan baik. Kantor Sekretariat DPRD PROVSU juga melakukan penghematan atas anggran agar realisasi anggran bisa sesuai dengan budget anggaran yang disediakan. Pada Kantor Sekretaria DPRD PROVSU mengalami fluktuasi dimana pertumbuhan kinerja keuangannya bernilai negative yang disebabkan karena minimnya realisasi, namun pertumbuhan belanja cenderung bernilai positif, sehingga mengamali pola hubungan delegative dan

				partisipatif dan mampu mengelola keuangannya dengan memanfaatkan sumber pendapatan yang potensial dari PAD.
--	--	--	--	---

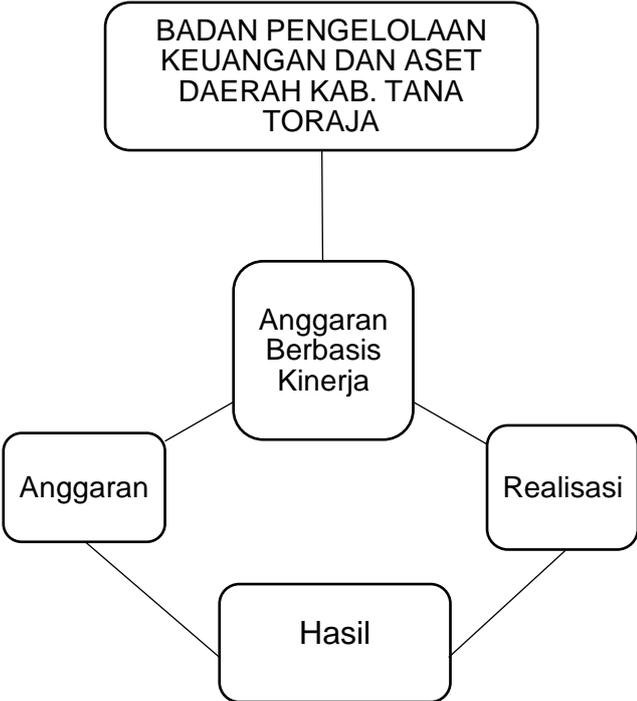
Sumber: Data diolah,2023

2.3 Kerangka Pikir

Dalam sebuah instansi tidak terlepas dari sebuah penganggaran, baik penganggaran pusat maupun penganggaran daerah. Penganggaran merupakan rencana keuangan yang dibuat secara rinci dan sistematis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Kedua undang undang tersebut membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawabn atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efisien dan efektif, hal tersebut dapat dipenuhi dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD). Dengan pembangunan suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan akan terlihat adanya keterlibatan antara dana yang tersedia dengan hasil yang di harapkan.

Gambaran Kerangka Pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 1 Kerangka Pikir



Sumber: Data dioalah,2023

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian penyusunan anggaran dan selisih realisasi anggaran belanja dengan kalimat penjelasan secara kualitatif. Menurut Sijabat, Saleh & Wachuid (2013) penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

Sugiyono (2015) Mengemukakan bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaanya.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat postitivisme, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah dimana peneliti sendiri adalah instrumennya, Teknik pengumpulan data dan di analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian yang berjudul “Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Dan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 - 2022” dilakukan di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD), yang berlokasi di Jl. Sultan Hasanuddin No.3. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan juni 2023 hingga bulan juli 2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Sugiyono 2018):

- a. Data Primer, adalah sumber yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini sumber data yang langsung di kumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber utamanya dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data primer didalam penelitian ini adalah pemangku jabatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- b. Data Sekunder, adalah sumber data yang tidak langsung memberikan kepada pengumpul data, yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Umumnya berupa informasi catatan atas laporan yang diarsipkan, seperti laporan anggaran dan realisasi anggaran serta dokumen-dokumen lainnya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber, dan cara. Bila dilihat dari cara atau Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara obvervasi (pengamatan), wawancara (*interview*), dokumentasi atau gabungan semuanya.

Sugiyono (2018), Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan Teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian dimana melihat dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan 2004).

b. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkaitan di Bagian Keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang dapat disajikan sebagai bahan peneliti yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.

3.5 Teknik Analisis Data

Jika dilihat dari keselarasan pada karakteristik penelitian kualitatif, analisis data selama penelitian berlangsung. Klasifikasi data yang dikumpulkan dan setelah itu menyimpulkan secara bertahap. Proses analisis data dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan yang tertulis dilapangan, dokumen resmi, gambaran atau foto dan sebagainya. Proses analisis data menjadi tiga yang saling berhubungan sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data identik dengan kegiatan pemilihan informasi hasil temuan dilapangan. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian, pada penyederhanaan, pengabstrakan terinformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tulisan dilapangan (*field note*). Reduksi

data didalam penelitian ini dilakukan dengan cara memilah informasi penting hasil temuan dilapangan. Peneliti hanya memilih data berdasarkan kebutuhan sehingga data data yang dianggap tidak mewakili informasi penelitian tidak peneliti cantumkan (Faud & Nugroho 2014)

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan pembagian pemahaman peneliti tentang hasil penelitian. Penyajian data mempermudah peneliti dalam melihat gambar secara keseluruhan dari penelitian. Pada penelitian ini, penyajian data yang digunakan pada data yang telah direduksi yaitu disajikan dalam bentuk naratif yang didukung oleh dokumen-dokumen, table data, maupun gambar yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan data yang telah direduksi secara jelas dan utuh dalam bentuk teks naratif tentang strategi apa yang dilakukan dan berhasil tidaknya strategi tersebut agar dapat menarik kesimpulan.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan menganalisis akhir yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti memaparkan kesimpulan yang berkaitan dengan proses penyusunan anggaran berbasis kinerja yang mempengaruhi realisasi anggaran belanja yang membantu mewujudkan akuntabilitas.

3.6 Pengecekan Validasi Temuan

Menurut sugiyono (2018), dalam sebuah penelitian kualitatif validasi meliputi uji keabsahan meliputi uji kredibilitas. Uji keabsahan atau uji kredibilitas terhadap sebuah data dari hasil penelitian kualitatif yakni dapat dilakukan dengan

perpanjangan pengamatan, triangulasi, analisis kasus negatif, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan *membercheck*.

Dalam penelitian ini menggunakan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi dalam uji kredibilitas.

1. Perpanjangan Pengamatan

Dalam penelitian ini, perpanjangan pengamatan hanya memfokuskan pada kegiatan pengecekan kembali tentang penyajian laporan realisasi anggaran tahun 2021 sampai tahun 2021 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja

2. Meningkatkan Ketekunan

Adapun peningkatan ketekunan yang dilakukan dalam penelitian ini yakni dengan membaca berbagai referensi buku atau jurnal, dokumen-dokumen yang terkait, serta hasil penelitian dengan sebuah temuan yang diteliti.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik pengumpulan data.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memeriksa kembali data yang telah didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan pada kepada Bapak Micha Lembang,SE.,MM dan Ibu Sartika Pala`lapangan,SE.,M.Si untuk menarik kesimpulan apakah telah sesuai dengan hasil pengamatan dan wawancara.

b. Trianggulasi Teknik

Peneliti ini melakukan uji kredibilitas data dengan cara mengecek kembali data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, dimana teknik yang dimaksud itu adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3.7 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan- tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Tahap Pra Lapangan

Tahap ini merupakan awal sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan (persiapan ini dilakukan agar peneliti menambah pengetahuan dan melakukan kesiapan yang optimal tentang yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Memilih lapangan penelitian
- 2) Menyusun rancangan penelitian
- 3) Memilih narasumber
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian
- 5) Persoalan etika penelitian

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Pada tahapan ini peneliti mengumpulkan data-data yang terkait dengan fokus penelitian yaitu, tentang Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Realisasi Anggaran tahun 2021-2022 di kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang penyusunan anggaran dan realisasi anggaran belanja.

c. Tahap Analisis Data

Tahap ini meliputi kegiatan pengelolaan data yang diperoleh melalui observasi, partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi setelah

itu dilakukan penafsiran data sesuai dengan konteks permasalahan yang penulis teliti. Selanjutnya dilakukan pengecekan keabsahan data dengan cara mengecek sumber data dan metode yang digunakan untuk memperoleh data sebagai yang valid, sebagai dasar penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan menyajikan data yang telah diperoleh selama penelitian. Observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap informan yang memiliki kompetensi dalam menjawab penelitian ini, sangat membantu peneliti untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai hal yang diteliti. Uraian hasil dan pembahasan didasarkan pada focus penelitian yang telah ditetapkan.

4.1 Serajah BPKAD Kabupaten Tana Toraja

Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja penggabungan antara dua instansi, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Namun Dinas Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kemudian dipisahkan menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di singkat BPKAD yang merupakan lembaga pemerintah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah Bupati melalui Sekretaris Daerah Tana Toraja.

Tata kerja BPKAD Tana Toraja adalah melaksanakan fungsi penunjang mengenai urusan pemerintah untuk mendukung seluruh tugas Bupati Tana Toraja dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah pada biding Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Untuk menyelenggarakan terdapat tujuan dan sasaran yang disusun untuk mencapai kondisi yang diinginkan dimasa yang akan mendatang. Adapun tujuan jangka

menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dalam upaya memperoleh pendapatan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang baik untuk memenuhi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
- 3) Menyediakan sasaran dan prasarana untuk meningkatkan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.
- 4) Mewujudkan penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.

4.1.1 Visi BPKAD Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan keadaan saat ini dan perkiraan strategi 5 tahun yang akan datang Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menetapkan visi dan misi yang telah dirumuskan dan menjadi komitmen Bersama dengan melibatkan *stakeholders* di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja. Adapun visi yang ditetapkan yaitu: Daerah Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Kinerja Guna Mendukung Pelayanan Pemerintah dan Pembangunan yang Bersih, Berkualitas, Profesional dan Akuntabel.

Harapan yang dikandung dari visi sebagaimana tersebut diatas adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi instansi yang terpercaya dan handal dalam tata kelola keuangan dan aset daerah berbasis kinerja guna mendukung pelayanan pemerintah dan pembangunan yang bersih, berkualitas, professional dan akuntabel. Disamping itu badan pengelolaan dan aset daerah ikut berperan serta dalam mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang tertuang dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018-2022.

4.1.2 Misi BPKAD Kabupaten Tana Toraja

Dengan rangka mewujudkan wujudkan harapan yang terkandung dalam visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja maka perlu dirumuskan misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan proyeksi kondisi tantangan masa depan. Selaras dengan visi yang telah dirumuskan Bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja merumuskan misionis untuk periode tahun 2018 sampai dengan 2022 yaitu:

- 1) Mengembangkan kebijakan dan tata kelola fiskal daerah yang sehat dan lebih responsif.
- 2) Mewujudkan manajemen keuangan dan aset daerah yang berkualitas.
- 3) Penempatan organisasi yang berbasis manusia yang unggul dalam moral, terampil dan memahami medan kerja.

4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD Kabupaten Tana Toraja

Berdasarkan Rancangan Peraturan Bupati Tana Toraja Mengenai tugas dan fungsi, serta tata kerja BPKAD Kabupaten Tana Toraja yaitu sebagai berikut:

1) Kepala Badan

Kepala Badan bertugas untuk membantu Bupati Tana Toraja dalam menjalankan dan melaksanakan fungsi penunjang urusan-urusan yang berhubungan dengan pemerintah pada Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, salah satu tugasnya yaitu Menyusun rencana dan program kerja Badan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas.

2) Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk membantu Kepala Badan melaksanakan koordinasi kegiatan, atau dalam hal memberikan pelayanan teknis dan

administrasi penyusunan pelampiran, umum, kepegawaian, program, dan keuangan dalam lingkungan Badan. Mengawasi, memantau, mendistribusikan, memberikan petunjuk, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas sehingga bisa berjalan dengan lancar merupakan salah satu tugas utama sebagai seorang sekretaris.

3) Bidang Anggaran

Tugas bidang anggaran yaitu penyusunan perencanaan, mengkoordinasi, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan pada bidang anggaran. Salah satu tugas bidang anggaran yaitu penyusunan rancangan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan rancangan perubahan APBD.

4) Bidang Perbendaharaan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu Kepala Badan menyusun rencana, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pada Bidang Perbendaharaan. Beberapa tugas penting Bidang Perbendaharaan yaitu menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), membuat register penolakan untuk menerbitkan SP2D, serta mengatur dana-dana yang diperlukan untuk APBD.

5) Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh Kepala Bidang yang membantu Kepala Badan mengatur seluruh kegiatan yang dilaksanakan dibidang akuntansi. Seperti menyusun kebijakan-kebijakan akuntansi daerah, menganalisis laporan keuangan pemerintah daerah, serta mengendalikan pelaksanaan dari kebijakan akuntansi daerah Kabupaten Tana Toraja.

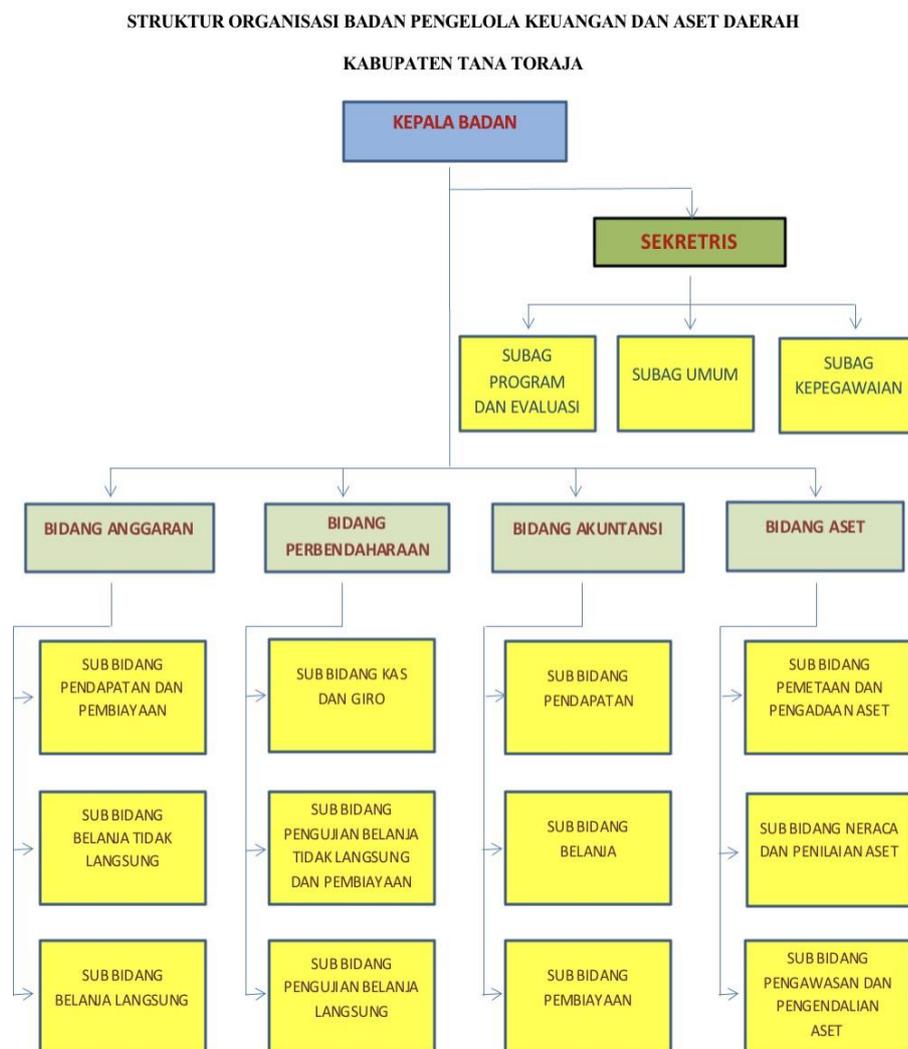
6) Bidang Aset

Pada Bidang Aset dipimpin oleh Kepala Bidang yang membantu Kepala Badan dalam mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan pada Bidang Aset. Seperti, melaksanakan penyusunan DKBMD (Daftar Kebutuhan Brang Milik Daerah) serta melaksanakan penyusunan neraca barang milik daerah.

4.1.4 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Tana Toraja

Adapun struktur organisasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Tana Toraja



4.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi yang telah dilakukan bersama pemangku jabatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja. Adapun hasil penelitian ini yaitu sebagai berikut:

4.2.1 Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran yang disusun mencerminkan kebutuhan dan prioritas aktual dari kabupaten. Dalam penyusunan anggaran itu dilakukan dengan menerima semua anggaran yang dibutuhkan pada kegiatan yang akan di laksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah Organisasi Perangkat Daerah menyusun dan melaporkan semua kegiatan dan biaya yang akan digunakan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja akan bertanggungjawab menyusun semua anggaran yang dibutuhkan oleh Organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi anggaran tahunan.

Berikut pernyataan dari Bapak Micha Lembang,SE.,MM Sebagai Kepala Dinas BPKAD:

“ Setelah kami telah merangkum semua anggaran yang dibutuhkan OPD, kami akan melakukan Penyusunan Anggaran yang berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah, serta dokumen dokumen yang diperlukan dalam menyusun anggaran untuk tahun anggaran.”

Permasalahan yang terkadang muncul dari proses penyusunan anggaran terletak pada kurang pahamnya OPD tentang penempatan nama akun dan kekeliruan OPD dalam melakukan penyusunan. Hal tersebut yang membuat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja melakukan pemeriksaan dan peninjauan ulang terhadap laporan penyusunan anggaran dari setiap OPD.

Berikut pernyataan dari Bapak Michat Lembang,SE.,MM Sebagai Kepala Dinas BPKAD:

“Terkadang laporan penyusunan anggaran yang datang diserahkan di kantor harus kami periksa dan tinjau kembali karena ada beberapa OPD yang menyusun anggaran dengan asal-asalan, sehingga terkadang ada nama akun yang salah penempatan yang seharusnya masuk di belanja hibah malah mereka masukkan ke belanja modal, itu yang membuat kami harus memeriksa dan meninjau ulang, agar pada saat realisasi dan pemeriksaan BPK tidak ada temuan yang mencurigakan”

Hal seperti ini yang membuat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja harus melakukan pemeriksaan dan peninjauan ulang yang lebih teliti apakah OPD sudah membuat laporan sesuai dengan penempatan nama akunnnya, seperti pada Rumah Sakit untuk pengadaan kursi roda apakah sudah dalam akun belanja hibah atau malah mereka masukkan ke belanja modal begitupun dengan laporan penyusunan anggaran lainnya.

4.2.2 Analisis Efektifitas Dan Efisien Realisasi Anggaran

Dalam proses Realisasi Anggaran berisi tentang pengalokasian dana. Pada Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja, Laporan Realisasi Anggaran berisi informasi tentang pelaksanaan anggaran yang meliputi pembiayaan, belanja dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengalokasian dana. Bidang Akuntansi adalah bidang yang bertanggung jawab atas Realisasi Anggaran. Dalam Realisasi Anggaran sebelum dilakukan percairan dana harus menyiapkan dokumen-dokumen persyaratan yang dibutuhkan, hal ini diperlukan agar mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang mungkin akan terjadi.

Berikut pernyataan dari Ibu Sartika Pala`lapangan,SE.,MSi Sebagai Kepala Bidang Akuntansi:

“ Dalam proses tersebut kami namakan dengan siklus pelaksanaan anggaran yang didalamnya itu ada Persiapan seperti persiapan dokumen-

dokumen-doukumen yang dibutuhkan, Pelaksanaan seperti kegiatan-kegiatan yang telah di anggarkan, Pemantauan seperti membentuk tim yang akan melihat bagaimana dan apakah kegiatan sudah berjalan dan Evaluasi seperti memeriksa laporan hasil dari kegiatan atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). “

Setelah tahap persiapan dokumen dilakukan terkadang ada masalah yang timbul diakibatkan kurang telitinya Bidang Anggaran dalam memeriksa Laporan Penyusunan Anggaran dari tiap-tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti masih ada nama akun yang keliru penempatannya seperti adanya belanja yang seharusnya dimasukkan ke Belanja Hibah tetapi dimasukkan ke Belanja Modal, masalah yang timbul ini sama dengan masalah yang dihadapi oleh Bidang Anggaran sehingga membuat Bidang Anggaran tetap lebih teliti melihat Laporan Penyusunan Anggaran.

Berikut pernyataan dari Ibu Sartika Pala`lapangan,SE.,MSi Sebagai Kepala Bidang Akuntansi:

“ Kami di Bidang Anggaran tidak akan langsung mencairkan dana yang ada pada laporan penyusunan anggaran, karena terkadang masih ada kendala yang terjadi sehingga, pengecekan ulang, pemeriksaan tetap kami lakukan, contoh seperti masalah yang sering kami dapat itu masih ada akun yang salah tempatannya, meskipun di bidang anggaran sudah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan akan tetap terkadang masih ada.”

Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja tidak akan mengeluarkan anggaran yang salah penempatan nama akunnya, dan akan di masukkan kedalam anggaran tahun selanjutnya.

Berikut ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Belanja tahun 2021 sampai tahun 2022 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja untuk melihat tingkat penyerapan presentase dana menggunakan perhitungan varians sebagai berikut:

1) Analisis Varians Belanja

Perhitungan varians belanja BPKAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022:

Analisis Varians Belanja = Realisasi Anggaran – Analisis Belanja
--

a. Tahun 2021:

Anggaran Belanja	Rp. 1.022.435.599.921,00
------------------	--------------------------

Realisasi Belanja	Rp. 867.918.072.184,57
-------------------	------------------------

Varians = Rp. 867.918.072.184,57 - Rp. 1.022.435.599.921,00 = - Rp.154.517.527.736,43
--

b. Tahun 2022:

Anggaran Belanja	Rp. 1.148.751.316.973,00
------------------	--------------------------

Realisasi Belanja	Rp. 243.567.025.418,29
-------------------	------------------------

Varians = Rp. 243.567.025.418,29- Rp. 1.148.751.316.973,00 = - Rp. 905.184.291.564,71
--

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai varians (selisih) anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2022 dilihat secara keseluruhan bahwa tingkat penyerapan anggaran tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Pernyataan tersebut dapat dijelaskan dari hasil perhitungan diatas yang menunjukkan bahwa anggaran belanja tahun 2021 sebesar Rp. 1.022.435.599.921,00 dan realisasi belanja sebesar Rp.867.918.072.184, sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp.154.517.527.736,43 yang tidak terealisasi dari total anggaran yang diterima. Anggara belanja tahun 2022 sebesar Rp. 1.148.751.316.973,00 dan realisasi

belanja sebesar Rp. 243.567.025.418,29, sehingga menimbulkan selisih sebesar Rp. 905.184.291.564,71, yang tidak terealisasi dari total anggaran yang diterima.

2) Analisis Presentase Varians Belanja

Perhitungan presentase varians belanja BPKAD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022:

$$\text{Presentase Varians Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

a. Tahun 2021:

Anggaran Belanja Rp. 1.022.435.599.921,00

Realisasi Belanja Rp. 867.918.072.184,57

$$\begin{aligned} \text{Presentase Varians} &= \frac{\text{Rp. 867.918.072.184,57}}{\text{Rp. 1.022.435.599.921,00}} \times 100\% \\ &= 84,89\% \end{aligned}$$

b. Tahun 2022:

Anggaran Belanja Rp. 1.148.751.316.973,00

Realisasi Belanja Rp. 243.567.025.418,29

$$\begin{aligned} \text{Presentase Varians} &= \frac{\text{Rp. 243.567.025.418,29}}{\text{Rp. 1.148.751.316.973,00}} \times 100\% \\ &= 86,82\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa anggaran belanja dan realisasi anggaran belanja diperoleh hasil presentase tahun 2021 mencapai 84,89%. Tahun 2022 terjadi peningkatan mencapai 86,82%. Dari keseluruhan, hasil yang dicapai oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja dalam mewujudkan anggaran belanja

yang terealisasi dengan nilai presentasi yang mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 84,89% ke 2022 menjadi 86,82%.

3) Skala penilaian Presentase Realisasi Belanja

Tabel 4. 1 Perhitungan Penilaian Presentase Tahun 2021-2022

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Selisih	Persentase	Ukuran	Nilai Varians
2021	1.022.435.599.921,00	867.918.072.184,57	-154.517.527.736,43	84,89%	≥ 80%	Baik
2022	1.148.751.316.973,00	243.567.025.418,29	-905.184.291.554,71	86,82%	≥ 80%	Baik

Sumber : Data diolah 2023

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, menunjukkan ukuran presentase yang menentukan anggaran bisa dikatakan sudah terealisasi dengan efektif dan efisien, dilihat dari nilai variansnya. Diketahui bahwa tahun 2021 menunjukkan tingkat efektif dan efisien sebesar 84,89% atau dalam kriteria variansnya baik ($\geq 80\%$), dan ditahun 2022 tingkat efektif dan efisiennya meningkat sebesar 86,82% atau dalam kriteria variansnya baik ($\geq 80\%$). Meskipun kriteria nilai variansnya pada tahun 2021-2022 di $\geq 80\%$, tetapi tingkat pencapaian presentase dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang baik.

4.3 Pembahasan

Adapun hasil dari pengamatan dan data yang didapatkan sebagai berikut:

4.3.1 Analisis Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran adalah suatu alat yang terperinci yang digunakan dalam satu periode atau kurang lebih satu tahun. Anggaran merupakan dasar bagi pelaksanaan suatu kegiatan Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja. Maka disusunlah Anggaran belanja yang merupakan rencana belanja yang akan dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja. Tuntutan untuk melaksanakan secara terencana melalui penyusunan anggaran yang penjabarannya secara nyata dari rincian masing-masing tujuan program kerja yang akan dilaksanakan. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi.

Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja lakukan setiap awal tahun anggaran dengan melihat kebutuhan yang di perlukan. Sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang pedoman penyusunan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam penyusunan harus disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan keuangan daerah, sehingga pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan dengan efisien. Dengan memberikan wewenang kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun sendiri kebutuhan ataupun kegiatan beserta anggaran yang dibutuhkan untuk memaksimalkan pengalokasian dana. Dengan jangka waktu paling lambat minggu ke 4 pada bulan oktober sebelum memulai tahun anggaran, sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tahap awal penyusunan anggaran dilakukan dengan mengumpulkan laporan penyusunan anggaran dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja untuk kemudian dilakukan pemeriksaan dan peninjauan sebelum disatukan dalam Laporan Penyusunan Anggaran tahunan Kabupaten Tana Toraja.

Dari kebijakan Pemendagri Nomor 24 Tahun 2020, menjelaskan mengenai berkas/dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan anggaran dan susunan APBD tertuang pada format yang disusun dari; 1) Aturan APBD serta Prioritasnya dalam penganggaran yang bersifat sementara, 2) Perencanaan program kerja, 3) Perancangan aturan daerah mengenai APBD, 4) Perancangan aturan pimpinan daerah mengenai penjelasan APBD, serta peraturan yang diubah dan diprioritasnya yang bersifat sementara.

Tanpa penyusunan anggaran maka akan berdampak terhadap efisiennya penggunaan anggaran daerah. Demikian halnya dengan Instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Tana Toraja yang bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Dalam menyusun anggaran, diupayakan agar belanja operasional tidak melampaui pendapatan dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Artinya, antar pendapatan dan belanja harus berimbang.

Mardiasmo (2002) anggaran merupakan penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Dalam penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada pencapaian kinerja dampak dari visi, misi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja. Proses penyusunan tersebut meliputi dua tahapan:

a. Analisa Usulan Program

Penentuan program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan adalah menentukan biaya dan manfaat suatu kegiatan/program, selain itu dalam penentuan program dan kegiatan dicantumkan manfaat apa saja yang akan dihasilkan dalam kegiatan/program yang akan dijalankan.

b. Penelaan Program

Agar suatu program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik maka diberikan ukuran kinerja yang akan dicapai kemudian

mempertimbangkan dari sumberdaya yang akan diberikan oleh pemerintah, agar program/kegiatan masih relevan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi.

Indikator Kerja seperti; Perumusan Strategi, Perencanaan Strategi, Penyusunan Program/Kegiatan dan Penganggaran menjadi tolak ukur untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja dalam menilai kewajaran biaya suatu program/kegiatan. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi akan biaya yang kurang efisien pada tahun anggaran. Anggaran yang disusun dengan perencanaan dan mengacu pada peraturan tertentu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja sudah tidak diragukan lagi, dengan pencapaian kerja yang dapat diukur dengan mengaitkan antara pendanaan yang telah dituangkan kedalam setiap pencapaian dari semua kegiatan yang telah dianggarkan.

4.3.2 Analisis Efektifitas Dan Efisien Realisasi Anggaran

Anggaran dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yaitu dengan pelaksanaan anggaran (realisasi anggaran). Dalam realisasi anggaran meliputi seluruh kegiatan analisis efektif dan efisiennya suatu anggaran. Menilai tingkat efektif dan efisiennya suatu anggaran belanja dilihat dari tingkat presentase penyerapannya. Hal ini mendukung pendapat Saron (2017) yang menyatakan semakin besar realisasi anggaran belanja maka semakin tinggi pula presentase tingkat efektif dan efisien pelaksanaan anggaran.

Efektif dan efisiennya anggaran belanja pada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dihitung dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan anggaran yang direalisasikan dari tahun 2021 sampai tahun 2022 sebagai berikut:

1) Analisis Varians

Anggaran belanja merupakan batas maksimal pengeluaran yang boleh dilakukan instansi pemerintah. Dalam hal ini instansi pemerintah dalam tingkat penyerapan anggaran belanjanya dengan melihat selisih antara anggaran belanja dengan realisasi anggaran belanja. Analisis varians merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Analisis varians cukup sederhana namun dapat memberikan informasi yang sangat berarti. Berdasarkan laporan realisasi anggaran yang disajikan, pengguna laporan dapat mengetahui secara langsung besarnya varian anggaran belanja dengan realisasinya yang dapat dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah (Mahmudi, 2016)

Berdasarkan penjelasan oleh Mahmudi (2016), analisis varians yang diperoleh dari hasil perhitungan yang menyatakan penyerapan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja selama tahun anggaran 2021-2022 tidak melebihi anggaran yang ditetapkan. Jumlah anggaran yang tidak terealisasi bisa dilihat dari nominal selisih yang cukup besar. Dalam melakukan analisis varians hendaknya memperhatikan penghematan yang dilakukan berdasarkan jumlah nominalnya. Semakin sedikit sisa anggaran belanja maka pencapaian dalam penyerapan anggaran belanja sebuah instansi semakin baik, namun dalam penyerapannya tidak melebihi anggaran yang diperoleh. Dan sebaliknya jika sisa anggarannya banyak yang tidak terealisasi maka pencapaian dalam penyerapan instansi tersebut kurang baik karena rencana kerja yang dilakukan dan realisasinya kurang maksimal.

Nilai varians atas realisasi dengan anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja menunjukkan nilai varians yang diperoleh pada tahun 2021 dengan selisih

nominal sebesar Rp. 154.517.736,43 dan pada tahun 2022 dengan selisih nominal sebesar Rp. 905.184.291.554,71. Namun varians belanja ini dapat dilihat dalam pengelolaan keuangan atas anggaran belanja. Dengan melihat apakah realisasi anggaran belanja tidak melebihi anggaran belanja atau sebaliknya.

2) Analisis Presentase

Menilai tingkat presentase penyerapan anggaran yang terdapat pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja pada penelitian ini diukur berdasarkan presentase varians. Saron (2017) menyatakan bahwa semakin besar angka presentase makin efektif dan efisien pelaksanaan anggaran belanja begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka presentase varians semakin tidak efektif dan efisiennya pelaksanaan anggaran belanja. Presentase varians merupakan bagian penting dalam pengukuran realisasi anggaran belanja karena penggunaan belanja akan terlihat pada tingkat presentase ini, dengan adanya presentase varians dapat diketahui cara organisasi/instansi dalam memanfaatkan anggarannya sesuai dengan program/kegiatan yang direncanakan dalam memaksimalkan tujuan.

Berdasarkan hasil perhitungan dan presentase varians yang dilakukan maka dapat dinyatakan pencapaian realisasi anggaran belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja dari tahun 2021 sebesar 82,89%, dan telah mengalami peningkatan dalam pengelolaan anggaran yang dibuktikan pada tingkat presentase varians tahun 2022 sebesar 86,82%. Hal ini menunjukkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Toraja telah berusaha memaksimalkan tingkat realisasi anggaran, sehingga pengelola kebutuhan belanja bisa berjalan sesuai anggaran yang ditetapkan. Pernyataan tersebut mendukung pendapat Santoso (2011) yang menyatakan bahwa suatu

kegiatan dikatakan berjalan dengan baik jika pekerjaan mencapai hasil dengan biaya yang tidak melebihi anggaran.

3) Skala Penilaian Presentase Realisasi

Penilaian presentase adalah tolak ukur untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan organisasi/instansi dalam menjalankan program/kegiatan yang telah ditentukan. Tingkat penilaian pada presentase pencapaian dapat dilihat berdasarkan realisasi anggaran belanja dengan anggaran belanja. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran kementerian Negara/Lembaga Nomor 249/PMK.02/2011, semakin besar realisasi anggaran maka akan tinggi pula penilaian presentase pada tingkat efektif dan efisiennya pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan hasil perhitungan dan skala penilaian presentase, menunjukkan bahwa tingkat efektif dan efisien anggaran belanja dengan realisasi anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja tahun 2021-2022, terlihat bahwa telah masuk dalam penilaian yang sudah baik dalam presentase efektif dan efisien karena memiliki tingkat penilaian $\geq 80\%$ (baik) dalam 2 tahun berturut-turut, hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan penerimaan anggaran telah sesuai dan mampu merealisasikan anggaran yang telah direncanakan dengan tidak besar daripada anggaran yang direncanakan diawal.

Tercapainya tingkat penilaian presentase yang baik menggambarkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja, telah berhasil menjalankan tugas dengan semestinya, yang di lihat berdasarkan anggaran belanja yang terealisasi meskipun penilaian presentasenya belum 100% tetapi jika di lihat dari kriteria penilain presentase sudah baik dalam keberhasilan rencana kerja. Efektif dan efisiennya anggaran

belanja dengan realisasi anggaran lebih menitik beratkan pada tingkat keberhasilan organisasi/instansi dalam menjangapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam penelitian ini Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tana Toraja menunjukkan tingkat penilaian presentase yang baik dalam pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ritonga, Nurlia (2022) menganalisis realisasi anggaran pada instansi daerah yang diteliti berdasarkan analisis varians secara umum dapat dikatakan baik, maka pengelolaan keuangannya dapat dinilai baik.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasana makan dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Presedur penyusunan anggaran belanja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja berpedoman pada Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang pedoman penyusunan APBD dan Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan Proses penyusunan yaitu; Analisa Usulan Program, Penelaan Program. kebijakan Pemendagri Nomor 24 Tahun 2020, mengenai berkas/dokumen yang dibutuhkan dalam pembuatan anggaran san susun APBD. Serta yang menjadi Indikator Kerja dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja; Perumusan Strategi, Perencanaan Strategi, Penyusunan Program/Kegiatan dan Penganggaran menjadi tolak ukur untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Kabupaten Tana Toraja dalam menilai kewajaran biaya suatu program/kegiatan.
2. Dilakukan perhitungan Ketika penyusunan anggaran belanja sehingga memperoleh beberapa faktor untuk mempertimbangkan hasil atau tarif yang sesuai dan efektif serta efisien pada tahun sebelumnya. Diperoleh hasil bahwa analisis varians yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021-2022 secara menyeluruh yang diperoleh pencapaian $\geq 80\%$ yang dikategorikan sudah baik dan berjalan dengan efektif dan efisien. Sebab realisasinya tidak melebihi anggarakan yang diberikan,

terlihat pada jumlah selisih yang menjelaskan bahwa realisasi belanja \leq anggaran belanja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam penyusunan anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Ast Daerah Kabupaten Tana Toraja harus tetap dipertahankan karena sudah sesuai dengan pedoman penyusunan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Dan harus memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan agar anggaran yang digunakan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga penyerapan anggaran berjalan dengan baik dan efektif.
2. Efektif dan efisien yang sudah baik dalam pengelolaan anggaran belanja dalam pencapaian program dan kegiatan dalam kelompok belanja langsung sesuai yang diharapkan dan mencapai tujuan yang optimal dan tidak mengalami pemborosan. Anggaran belanja yang dapat terserap dengan baik, secara efektif dan efisien, agar pergerakan pertumbuhan realisasi anggaran lebih meningkatkan lagi ditahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, J., & Ratulangi, U. S. (2020). *28006-57549-1-Pb*. 15(2), 131–138.
- Diponegoro, U. (2015). *Berpengaruh Terhadap Efektivitas (Studi Kasus Pada Skpd Pemerintah Kabupaten Grobogan)*.
- Nurfadillah. (2018). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Keuangan Pemerintah*, 1(69), 1–101.
- Nurhaliza, F. (2022). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Utara*.
- Permana, R., Ekonomi, F., & Akuntansi, P. S. (2012). Universitas Indonesia Analisis Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja : Studi Kasus Pada Universitas Indonesia. *Jakarta: Universitas Indonesia*.
- Rawung, P. M. (2021). Evaluasi Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Di Instansi Pemerintah Daerah Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 9(1), 1155–1164.
- Ritonga, J., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Pemerintahan Kota Medan. *VISA: Journal of Vision and Ideas*, 3(2), 153–166.
- Rizaldi, D. R. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus pada Satuan Kerja di Wilayah Kerja KPPN Jakarta II). *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 1(3), 85–104.
- Romanda, C., & Dwiyant, I. J. D. J. (2021). Analisis Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Manajemen Malahayati*, 9(2), 70–78.
- Seli Fatmahwati. (2016). Analisis kinerja belanja Daerah dalam laporan realisasi Anggaran pada BPPKAD Kota Surakarta (2018 – 2020). (2018 – 2020) *Disusun*, 3, 103–111.

- Septiana, R. (2020). *Analisis penyusunan anggaran pada kantor cama dlitua kabupaten deli serdang tahun anggaran 2017-2019*.
- Wahyu Niansyah, F. I., & Biswan, A. T. (2018). Analisis Varians Anggaran Belanja untuk Pengukuran Kinerja. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 3(4), 348–363.
- Aderibigbe. (2018). *Efektifitas Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Menilai Kinerja Keuang Pemerintah Kota Makassar*. *Energies*, 6(1), 1–8.
- Fanda Jessica M. & Harijanto (2020) *Analisis Penyusunan Anggaran Dan Realisasi Belanja Pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado*.
- Pemendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Kebijakan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Tentang Panduan Cara Tata Kelola Keuangan Daerah.
- Kebijakan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Realisasi Anggaran Bertujuan Dalam Penerapan Berbagai Dasar Cara Laporan.
- Undang - Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang - Undang No. 33 Tahun 2004 Tantang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah.
- Pemendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pemendagri No. 24 Tahun 2020 Tentang Berkas/Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Pembuatan Anggaran Dan Susunan APBD.

LAMPIRAN

Hasil wawancara dengan pemangku jabatan yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja:

Bidang Anggaran oleh Bapak Micha Lembang,SE.,MM

1. Bagaimana proses penyusunan anggaran di BPKAD Tana Toraja?

Jawaban :

Setelah kami telah merangkum semua anggaran yang dibutuhkan OPD, kami akan melakukan Penyusunan Anggaran yang berpedoman pada Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana pengelolaan keuangan daerah, serta dokumen dokumen yang diperlukan dalam menyusun anggaran untuk tahun anggaran

2. Apakah Hambatan utama yang dihadapi dalam proses penyusunan anggaran dan bagaimana upaya untuk mengatasi ?

Jawaban:

Terkadang laporan penyusunan anggaran yang datang diserahkan di kantor harus kami periksa dan tinjau kembali karena ada beberapa OPD yang menyusun anggaran dengan asal-asalan, sehingga terkadang ada nama akun yang salah penempatan yang seharusnya masuk di belanja hibah malah mereka masukkan ke belanja modal, itu yang membuat kami harus memeriksa dan meninjau ulang, agar pada saat realisasi dan pemeriksaan BPK tidak ada temuan yang mencurigakan.

3. Bagaimana BPKAD Kabupaten Tana Toraja melibatkan berbagai pihak terkait dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja?

Jawaban:

Dalam proses penyusunan anggaran ini pasti sangat dibutuhkan keterkaitan dari berbagai pihak, supaya dapat bersama-sama ikut ambil andil didalamnya. Hal ini dengan OPD-OPD diberikan hak untuk menyusun sendiri anggaran yang mereka butuhkan dalam program/kegiatan yang mereka akan lakukan dalam satu periode. Kami juga melakukan diskusi antar bidang yang bertanggungjawab atas penyusunan anggaran.

4. Apa rencana BPKAD Kabupaten Tana Toraja dalam meningkatkan efektifitas proses penyusunan anggaran berbasis kinerja?

Jawaban:

Kami akan terus meningkatkan untuk OPD-OPD agar lebih memahami cara menyusun anggaran agar tidak ada kekeliruan dalam laporan anggaran yang akan mereka setor ke BPKAD.

5. Apa peran indicator kinerja dalam penyusunan anggaran dan bagaimana memastikan bahwa indikator tersebut dapat diukur?

Jawaban:

Saat kami melakukan penyusunan anggaran kami juga memikirkan tingkat keberhasilan yang dicapai, dengan indikaor kerja yang membantu kamu untuk mengukur hasil yang akan kami capai dalam menyusun anggaran.

6. Pada tanggal berapakah batas waktu penyetoran laporan penyusunan anggaran dari OPD?

Jawaban:

Itu sebulan sebelum dimulai tahun anggaran, atau pada akhir bulan oktober OPD harus menyetor laporan penyusunan anggarannya.

7. Apakah ada pengukuran kinerja yang ditetapkan di BPKAD Kabupaten Tana Toraja?

Jawaban:

Tentu ada, pengukuran suatu anggaran yang akan disusun yang akan dijadikan pertimbangan, apakah nantinya akan mencapai tujuan dengan maksimal dalam anggaran yang telah disiapkan

Jika sata dilihat dilapangan keberhasilan dari panggaran yang telah disusun berarti kinerjanya sudah efektif dan efisien.

8. Bagaimana BPKAD Kabupaten Tana Toraja beradaptasi dengan dinamika perubahan kebijakan dan kebutuhan pembangunan daerah dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja?

Jawaban:

Dalam beradaptasi denagn dinamika perubahan kebijakan itu merupakan kemampuan yang harus dimiliki yang bekerja di BPKAD. Karena misalnya ada kebutuhan mendesak atau kedaan mendesak yang memerlukan respon ceptar dari kami selaku BPKAD akan melakukan pengalokasian sumberdaya yang secepat mungkin. Contohnya jembatan penghubung desa yang rusak akibat bencana alam hal seperti ini sesuatu yang tak terduga dan kebutuhan yang mendesak.

Bidang Akuntansi Ibu Sartika Pala`lapangan,SE.,MSi

1. Dalam Proses realisasi anggaran apakah semua harus sejalan dengan penyusunan anggaran?

Jawaban :

Ya, harus sejalan dengan penyusunan anggaran, karena hal tersebut untuk emmastikan anggaran tersebut sudah digunakan dengan efektif dan efisien sesuai rencana kerja di tahun anggaran.

2. Apakah tantangan utama yang dihadapi di bidang yang menangani realisasi anggaran ?

Jawaban :

Kami di Bidang Anggaran tidak akan langsung mencairkan dana yang ada pada laporan penyusunan anggaran, karena terkadang masih ada kendala yang terjadi sehingga, pengecekan ulang, pemeriksaan tetap kami lakukan, contoh seperti masalah yang sering kami dapat itu masih ada akun yang salah tempatannya, meskipun di bidang anggaran sudah dilakukan pemeriksaan dan peninjauan akan tetap terkadang masih ada.

3. Langkah apa yang dilakukan bidang akuntansi sebelum melakukan pencairan dana?

Jawaban :

Dalam proses tersebut kami namakan dengan siklus pelaksanaan anggaran yang didalamnya itu ada Persiapan seperti persiapan dokumen-dokumen-doukumen yang dibutuhkan, Pelaksanaan seperti kegiatan-kegiatan yang

telah di anggarkan, Pemantauan seperti membentuk tim yang akan melihat bagaimana dan apakah kegiatan sudah berjalan dan Evaluasi seperti memeriksa laporan hasil dari kegiatan atau Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

4. Apakah yang mengakibatkan anggaran yang telah disusun dan telah disetujui sering kali tidak bisa di cairkan 100%?

Jawaban :

Iya, hal ini pernah terjadi sekitar tahun 2018 kalau saya tidak salah, dimana saat itu pembuatan jembatan di daerah yang terpencil, dimana karena saat itu terlalu banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan pariwisata sehingga anggaran pembuatan jembatan tidak keluar 100%.

5. Apakah dalam realisasi anggaran yang dilakukan BPKAD berdasar pada hukum?

Jawaban :

Ya, dalam perealisasi dalam penggunaan anggaran berdasar pada undang-undang, hal ini untuk menjaga transparansi, akuntabilitas dalam pengelolaan dana.

6. Bagaimana upaya BPKAD Kabupaten Tana Toraja dalam memastikan bahwa sumberdaya yang dialokasikan dalam anggaran benar-benar digunakan dengan efektif dan efisien?

Jawaban :

Dengan melakukan pengawasan dan monitoring. Pengawasan yang rutin terhadap laporan keuangan setiap akhir bulan kepada OPD untuk memantau secara berkala terhadap transaksi keuangannya. Pelaporan

kegiatannya dan bagaimana pencapaiannya sudah berapa persen, apakah sudah maksimal atau belum. Kami melakukan untuk menghindari penyimpangan yang mungkin akan terjadi, serta untuk kami jadikan sebagai pembandingan rencana kerja dengan realisasinya.

7. Apakah BPKAD Kabupaten Tana Toraja memastikan bahwa program dan proyek yang di anggarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerah?

Jawaban:

Iya, dari pengelokasian sumber daya dan pelaksanaan program secara langsung mendukung pembangunan daerah. Saya ambil contoh seperti perbaikan infrastruktur, pembangunan sekolah, puskesmas dan masih banyak lagi di daerah pelosok, juga pengembangan pariwisata, kan itu masuk dalam kebutuhan masyarakat dan daerah.

8. Apakah BPKAD Kabupaten Tana Toraja memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan bagaimana masyarakat memantau dan melihat penggunaan dana publik?

Jawaban:

Penggunaan anggaran dapat dilihat seperti di laporan anggaran tahunan yang berisi penggunaan anggaran dan pencapaian kerja dalam setahun. Juga dapat dilihat pada web. Resmi SIPKD, dan seperti adek yang ini meneliti bagaimana laporan realisasi anggaran kami dapat berikan sesuai yang dibutuhkan.

Dokumentasi

Foto bersama Bapak Micha Lembang,SE.,MM Kepala Dinas, Ibu Sartika Pala`lapangan,SE.,MSi selaku Kepala Biangan Akuntansi dan Sfat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja

